

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perekonomian di Indonesia berada dibawah peraturan Kementrian Keuangan yang mengatur pengelolaan keuangan di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengelolaan Keuangan Negara adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sumber-sumber keuangan berupa pendapatan negara. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan dan Ketetapan Pemerintah Republik Indonesia.

Pengelolaan keuangan di setiap daerah dibantu oleh sebuah instansi pemerintahan yang bertanggung jawab atas segala anggaran dan laporan keuangan, seperti Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berada di setiap daerah yang ada di Indonesia salah satunya di Kota Padang. KPPN Padang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembayaran atas beban anggaran serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ditetapkan pejabat dan pelaksanaan pengelola keuangan daerah. Pejabat pengelola keuangan daerah yang berperan sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Perbendaharaan negara terdapat pada UU No.1 Tahun 2004 memuat tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perbendaharaan negara menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi keuangan negara.

Pejabat perbendaharaan negara terdiri dari pengguna anggaran dan Bendahara Umum Daerah (BUD). Bendahara umum daerah dibantu oleh 2 bendahara yaitu Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Bendahara penerimaan dan Bendahara pengeluaran diangkat oleh Menteri/pimpinan lembaga/gubernur / bupati / walikota untuk melaksanakan tugas kebendaharaan. Bendahara penerimaan sangat berperan penting dalam melaksanakan tugas yaitu untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN. Bendahara penerimaan memiliki tugas dan wewenang terhadap pejabat perbendaharaan negara lainnya antara lain KPA sebagai pimpinan dalam struktur pengelolaan keuangan satuan kerja dan PPK sebagai pihak yang memerintahkan pembayaran yang harus dilakukan kepada bendahara penerimaan. Bendahara pengeluaran memiliki tugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah. Bendahara

pengeluaran merupakan salah satu pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pembayaran atas uang yang ada dalam kewenangannya.

Setiap bendahara memiliki tugas untuk membuat Laporan pertanggungjawaban (LPJ). Laporan pertanggungjawaban (LPJ) merupakan laporan dalam bentuk dokumen tertulis yang disusun untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi lainnya yang lebih tinggi atau sederajat. Laporan ini berfungsi sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang dapat dicapai dari kegiatan tersebut. Laporan pertanggungjawaban bendahara (LPJ bendahara) adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.

Dampak yang timbul terhadap KPPN selama masa pandemi covid-19 menjadi suatu tantangan baru yang harus dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam merespon himbauan pemerintah untuk melakukan jaga jarak sebagai upaya pencegahan penularan Covid- 19, maka terhitung mulai tanggal 26 Maret 2020, satuan kerja mitra KPPN melakukan pelayanan tanpa tatap muka dengan mengakses semua layanan KPPN. KPPN sebagai bagian dari Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab dalam mengawal dan menjaga keuangan negara yang merupakan salah satu instrumen penting dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19.

Seiring dengan keadaan perekonomian dan kegiatan kerja maka penulis tertarik membahas tentang **“MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH BENDAHARA PENERIMAAN DI KPPN PADANG SELAMA COVID-19”**.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyampaian Laporan Pertanggungjawaban oleh Bendahara Penerimaan di KPPN Padang selama Covid-19?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Bendahara Penerimaan di KPPN Padang selama Covid-19 dalam mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban?

1.3 Tujuan Magang

1.3.1 Tujuan Umum Magang

1. Untuk memperkenalkan, meningkatkan dan memperluas pemahaman mahasiswa tentang dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Sarana aplikasi ilmu yang telah didapat selama kuliah dengan praktik yang ada di lapangan.
3. Sebagai salah satu usaha mempersiapkan SDM yang

berkualitas dalam menghadapi persaingan dimasa depan.

4. Salah satu syarat guna menyelesaikan study Program Diploma Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

1.3.2 Tujuan Khusus Magang

1. Untuk mengetahui mekanisme penyampaian Laporan Pertanggungjawaban oleh Bendahara Penerimaan di KPPN Padang selama Covid-19?
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh bendahara penerimaan di KPPN Padang selama Covid-19 dalam mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban ?

1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat atas dilaksanakannya program magang, yaitu :

1.4.1 Bagi Mahasiswa

1. Untuk dapat memperoleh pengalaman tentang mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh Bendahara Penerimaan di KPPN Padang selama Covid-19.
2. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama masa perkuliahan ke dalam dunia kerja.
3. Menambah pengetahuan penulis tentang mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh bendahara penerimaan di KPPN Padang selama Covid-19.

4. Memperoleh pengalaman kerja terutama untuk prosedur mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh Bendahara Penerimaan di KPPN Padang selama Covid-19.
5. Membentuk kepribadian yang bertanggung jawab dan disiplin dalam dunia kerja.

1.4.2 Bagi Universitas Andalas

1. Untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik antara Universitas Andalas dengan KPPN Kota Padang.
2. Untuk meningkatkan kualitas dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan pendidikan dan industri. Melalui pengalaman magang, sehingga Universitas Andalas lebih dikenal oleh masyarakat luas dan dunia kerja.
3. Memperkenalkan sekaligus mempromosikan program Diploma III Keuangan yang berkualitas dan siap bersaing dalam dunia kerja.

1.4.3 Bagi Instansi

1. Mempermudah dan membantu segala aktivitas yang ada pada instansi tersebut.
2. Dapat menjalin kerjasama antara instansi dengan lembaga Pendidikan.
3. Dapat memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas.
4. Memberikan kontribusi yang baik terhadap mahasiswa magang sebagai partisipasi nyata yang diberikan oleh instansi.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Dalam menjalankan kegiatan magang, penulis menentukan waktu kegiatan magang selama 40 hari kerja pada bulan Januari dan Februari 2021.

1.6 Metode Pengumpulan Data

1.6.1 Study keperustakaan

Yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan bacaan yang mencakup buku teks dan bahan-bahan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas oleh penulis.

1.6.2 Study Lapangan

1. Data Primer

Data yang didapat dari wawancara dengan karyawan dan pejabat yang berkepentingan di KPPN Kota Padang.

2. Data Sekunder

Data berupa laporan mengenai aktivitas yang berhubungan dengan objek yang dibahas.

1.7 Metode Analisa Data

Dalam hal pembahasan dan penganalisan nantinya akan digunakan analisa deskriptif dan metode kualitatif yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.7.1 Metode Analisa Deskriptif

Yaitu memberikan gambaran mengenai mekanisme penyampaian laporan pertanggung jawaban oleh bendahara penerimaan di KPPN Padang selama Covid-19.

1.7.2 Metode kualitatif

Membandingkan praktik dengan teori sehingga dapat diketahui berapa jauh perbedaan atau persamaan kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan.

1.8 Sistematika Laporan

Bab I : Pendahuluan

Berisikan pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat, tempat, rencana kegiatan dan sistematika penyusunan laporan.

Bab II : Landasan Teori

Membahas mengenai pengertian Keuangan Negara, pengertian anggaran, Perbendaharaan Negara, pengertian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), tujuan dan fungsi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), jenis-jenis Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), pengaruh Covid-19 terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan.

Bab III : Gambaran Umum KPPN Kota Padang

Merupakan profil lembaga pelayanan meliputi sejarah berdirinya KPPN Kota Padang, tujuan, lokasi, status dan struktur organisasi.

Bab IV : Pembahasan

Bab ini lebih lanjut “Mekanisme Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban oleh Bendahara Penerimaan di KPPN Padang selama Covid-19”.

Bab V : Penutup

Membahas tentang kesimpulan dan saran.

